



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JATEN
KABUPATEN KARANGANYAR**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

KECAMATAN JATEN

**Jalan Raya Jaten No. 85, Jaten Telp/
Fax.(0271) 821319,
Www. Jaten.karanganyarkab.go.id
KABUPATEN KARANGANYAR**

**LAMPIRAN XXXV
PERATURAN BUPATI
KARANGANYAR
NOMOR 35 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2024**



RENCANA KERJA
KECAMATAN JATEN
TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Kerja Kecamatan Jaten Tahun 2024. Rencana Kerja ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, rencana program dan kegiatan serta anggaran Kecamatan Jaten selama satu tahun ke depan.

Dalam Rencana Kerja juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil atau kinerja. Berkenaan dengan hal tersebut dalam memenuhi dokumen perencanaan kerja Kecamatan Jaten, maka disusunlah Dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 yang berfungsi sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan kebutuhan program, kegiatan dan anggaran tahun 2024 Kecamatan Jaten.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam memenuhi dokumen perencanaan kerja Kecamatan Jaten, maka disusunlah Dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 yang berfungsi sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan kebutuhan program, kegiatan dan anggaran tahun 2024 Kecamatan Jaten.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga tersusunnya Rencana Kerja Kecamatan Jaten Tahun 2024 ini, semoga bermanfaat bagi yang berkepentingan.

Karanganyar, Juli 2023

CAMAT JATEN

TEGUH HARYONO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19670210 198603 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-6
1.4 Sistematika Penulisan	I-6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Jaten dan Capaian Perangkat Daerah.....	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-8
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	II-9
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	II-11
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	III-16
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	III-1
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	III-6
3.2. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Jaten.....	III-6
3.3. Program dan Kegiatan Kecamatan Jaten.....	III-8
3.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Jaten.....	III-14
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN JATEN...	IV-1
BAB V P E N U T U P.....	V-1

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Capaian Kinerja Program Kecamatan Jaten Tahun 2022	II-4
Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2023 Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar.. .	II-6
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar.....	II-9
Tabel 2.4 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	II-10
Tabel 2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kecamatan Jaten.....	II-14
Tabel 2.6 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Karanganyar.....	II-16
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Jaten Tahun 2024 – 2026.....	III.8
Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Jaten Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025.....	III-11
Tabel 4.1 Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Jaten Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024.....	IV-3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Jaten berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) guna menjadi dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan tolok ukur kinerja Kecamatan Jaten agar dapat memberikan kontribusi nyata dan factual terhadap peningkatan pembangunan daerah di Kabupaten Karanganyar untuk Tahun 2023.Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya Renja OPD adalah dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi Renja OPD adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari rencana strategis pembangunan daerah. Renja OPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun yang berpedoman pada renstra OPD. Renja OPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen renstra OPD dan merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan Renja OPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD serta dilaporkan dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Berpedoman pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 maka Organisasi Perangkat Daerah agar menyusun Rencana Kerja. Renja Kecamatan Jaten memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja Kecamatan Jaten Tahun 2024 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, melalui : evaluasi pencapaian target program dan kegiatan serta analisis kinerja.Dokumen Renja Kecamatan Jaten Tahun 2024 merupakan landasan dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Jaten tahun 2024 dilandasi dengan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);*
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);*
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 13. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan; Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung dan Kawasan Karanganyar – Tegal – Pemasang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
 14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan

- Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 111);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 134);
 28. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 11).
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024;
 30. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 – 2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Jaten Tahun 2024 ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023, dan perencanaan program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Jaten Tahun 2024.

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Jaten Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan program kerja pada Kecamatan Jaten pada Tahun 2024.
2. Memberikan arahan kebijakan dan prioritas pembangunan Kecamatan Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Jaten sebagai berikut

:

BAB I PENDAHULUAN

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja proses penyusunan Renja Kecamatan Jaten, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD. Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya. Membuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja dan sistematika.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok fungsi OPD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024.

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Jaten Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Jaten tahun lalu adalah penjabaran pelaksanaan tahunan dari Perubahan Renstra tahun 2018 – 2023. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun diukur berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dikaitkan dengan pencapaian target renstra Kecamatan Jaten berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Jaten tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2022 dan realisasi APBD Kecamatan Jaten serta perkiraan capaian tahun 2023.

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Tahun Anggaran 2022, Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar memperoleh alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten sebesar Rp. 2.584.845.250,- (*dua milyar lima ratus delapan puluh empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah*) yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 2.580.832.750,- (*Dua milyar lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*), dan belanja modal sebesar Rp. 4.012.500,- (*empat juta dua belas ribu lima ratus rupiah*). Dari total anggaran baik belanja operasi maupun belanja modal terealisasi sebesar Rp. 2.500.532.397,- (*dua milyar lima ratus juta lima ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah*) atau sebesar 97,74%, sisa anggaran Rp. 84.604.353,- (*delapan puluh empat juta tiga ratus dua belas ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah*) atau sebesar 2,26%, untuk belanja operasi terealisasi sebesar Rp. 2.496.228.397,- (*Dua milyar empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah*) atau sebesar 96,75% dan selisih anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 84.604.353,- (*delapan puluh empat juta enam ratus empat ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah*) atau sebesar 3,28%., sedangkan untuk belanja modal terealisasi sebesar Rp. 3.650.000,- (*tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*) atau sebesar 90,97% dan

selisih anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 362.500,- (*tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah*) atau sebesar 9,03%.

Realisasi Program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022 yang tidak memenuhi target kinerja tidak ada, seluruh kegiatan bisa memenuhi target kinerja yang telah direncanakan baik target kinerja hasil dan keluaran, walaupun anggaran tidak terserap secara maksimal namun hal ini justru terjadi efisiensi anggaran.

A. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan

Program dan kegiatan Kecamatan Jaten yang telah memenuhi target kinerja hasil dan keluaran yang telah direncanakan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program penunjang urusan pemerintah daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.152.222.050,- terealisasi sebesar Rp. 2.083.637.017,- (96,81%), realisasi untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :

- a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pagu anggaran sebesar Rp. 4.017.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.653.500,- (90,95%).
- b) Administrasi Keuangan Perangkat daerah pagu anggaran sebesar Rp. 1.895.660.250,- realisasi sebesar Rp. 1.838.870.588,- (97%).
- c) Administrasi Umum Perangkat Daerah pagu anggaran sebesar Rp. 85.876.100,- realisasi sebesar Rp. 82.300.000,- (95,84%).
- d) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pagu anggaran Rp. 4.012.500,- realisasi sebesar Rp. 3.650.000,- (90,96%).
- e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pagu anggaran sebesar Rp. 110.021.600,- realisasi sebesar Rp. 107.245.337,- (97,48%).
- f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah pagu anggaran sebesar Rp. 52.634.600,- realisasi sebesar Rp. 47.917.592,- (91,04%).

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Pagu anggaran untuk program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik ini sebesar Rp. 44.062.800,- realisasi sebesar Rp.

40.085.900,- (90,89%). Program ini hanya terdiri dari satu kegiatan saja yaitu Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan pagu anggaran Rp.44.062.800,- realisasi sebesar Rp. 40.085.900,- (90,89%).

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban

Program koordinasi ketentraman dan ketertiban terdiri dari satu kegiatan yaitu Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban dengan pagu anggaran sebesar Rp. 183.742.900,- realisasi sebesar Rp. 176.215.000,- (95,90%).

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terdiri dari satu kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 96.835.800,- realisasi sebesar Rp. 96.428.800,- (99,58%).

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terdiri dari satu kegiatan yaitu Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan pagu anggaran Rp. 102.717.290,- realisasi sebesar Rp. 99.999.200,- (97,35%).

B. Realisasi Program/ Kegiatan yang melebihi target kinerja yang telah direncanakan.

Program/ Kegiatan yang telah dilaksanakan Tahun 2022 oleh Kecamatan Jaten yang capaian kinerjanya melebihi target tidak ada.

Capaian kinerja program Kecamatan Jaten Tahun 2022, tersaji dalam tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Program Kecamatan Jaten Tahun 2022

No	Program	Indikator	Satuan	Tahun 2022					Tahun Terakhir RPJMD (2023)			
				Target	Capaian	%	Status		Target	%	Status	
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	nilai	74	80,96	109,41	Sangat Tinggi	Tercapai	75	118,66	Sangat Tinggi	Sudah Tercapai
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	80	88,89	111,11	Sangat Tinggi	Tercapai	85	104,57	Sangat Tinggi	Sudah Tercapai
3.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	%	80	87,50	109,38	Sangat Tinggi	Tercapai	85	102,94	Sangat Tinggi	Sudah Tercapai
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Desa Memiliki Apbdes Dan Rkpdes Sesuai Ketentuan	%	90	100	111,11	Sangat Tinggi	Tercapai	90	111,11	Sangat Tinggi	Sudah Tercapai
5.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Wilayah Tertib Perda	%	80	87,50	109,38	Sangat Tinggi	Tercapai	85	106,70	Sangat Tinggi	Sudah Tercapai

Sumber data : Kecamatan Jaten Tahun 2023

Hasil pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Jaten lebih lengkap dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2023
Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2021	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2023			
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SAKIP	0	75,28	68	68,45	117,5	70	68,50	97,85
				Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	100%	0	0	0	0	0	0	0
		2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100	2 dok	2 dok	100
		2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	12 bln	100
		2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	12 bln	100
		2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	24 unit	4 unit	2 jenis	2 jenis	100	3 jenis	3 jenis	100
		2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	12 bln	100
		2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	12 bln	100
7	01	02	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	81	78,79	74	80,96	109,4	75	81,25	108,3

			2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	12 bln	100
7	01	03		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	91%	90%	85%	88,89%	104,6	85%	90%	108,2
			2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	12 bln	100
			2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	12 bln	0	0	0	0	0	0	0
7	01	04		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif	90%	90%	80%	87,50%	109,4	80%	90%	112,5
			2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	12 bln	100
7	01	05		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	100%	0	0	0	0	0	0	0
					Persentase desa memiliki APBDes dan RKPBDdes yang sesuai ketentuan	0	100%	90%	100%	111,1	90%	100%	111,1
			2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	12 bln	100
7	01	06		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPBDdes yang sesuai ketentuan	91%	0	0	0	0	0	0	0
					Persentase Desa/Kelurahan tertib Perda	0	90%	90%	87,50%	109,4	90%	100%	111,1
			2.01	Fasilitasi, Rekomendasi & Koordinasi Pembinaan & Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintahan desa	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	12 bln	100

Sumber : Kecamatan Jaten Tahun 2024

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Jaten menjadi salah satu perangkat daerah yang berperan dalam mewujudkan tujuan pemerintah daerah yang tertuang dalam rencana pembangunan daerah yaitu meningkatkan daya saing daerah. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut maka Kecamatan Jaten menetapkan tujuan yaitu meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial yaitu dengan meningkatkan kualitas pembangunan desa. Selain itu Kecamatan Jaten menetapkan tujuan untuk meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat birokrasi yaitu dengan meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan dan meningkatkan kondusifitas wilayah. Peran strategis Kecamatan tidak lagi hanya peningkatan pelayanan publik namun lebih kepada kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan memperhatikan adanya reformasi birokrasi. Guna menghadapi tantangan dimaksud perlu dilakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan, tata laksana pemerintahan dan juga meningkatkan kondusifitas wilayah. Selain itu Kecamatan Jaten juga memiliki peran strategis dalam menekan angka kemiskinan dengan meningkatkan kualitas pembangunan di desa dan juga meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat yang mendukung terciptanya kualitas tata laksana pemerintahan. Selain itu, secara berkelanjutan meningkatkan kualitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya untuk menekan angka kemiskinan.

Sesuai dengan indikator kinerja utama yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Camat Jaten Tahun 2024 dan Rencana Strategis Kecamatan Jaten Tahun 2024 - 2026, yaitu indeks reformasi birokrasi. Pada tahun 2022, indeks reformasi birokrasi Kabupaten Karanganyar mendapatkan skor 63. Sedangkan untuk Nilai SAKIP yang merupakan hasil penilaian kinerja perangkat daerah yang di review oleh Inspektorat Daerah, Kecamatan Jaten berhasil memperoleh nilai 68,45 dengan kategori B. Untuk jumlah kasus gangguan keamanan, ketertiban

dan kenyamanan belum ada data yang tersedia. Untuk angka kemiskinan Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2022 yaitu sebesar 9,85. Dan yang terakhir yaitu indeks desa membangun Kecamatan Jaten pada tahun 2022 sebesar 0,7929 Karena Kecamatan hanya menangani urusan penunjang maka tidak ada SPM/ standar nasional, namun pada tahun 2024 Kecamatan Jaten juga mendukung secara khusus pencapaian IKK (indikator kinerja kunci) tingkat kabupaten yaitu Angka Kemiskinan dan indeks reformasi birokrasi Berikut ini disajikan tabel pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Jaten. (tabel 2.3)

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jaten
Kabupaten Karanganyar

NO	Indikator	Target Renstra OPD			Realisasi	Proyeksi		Catatan Analisis
		2024	2025	2026		2022	2023	
1	Indeks reformasi birokrasi	65	67	70	63	64	65	
2	Nilai SAKIP OPD	75,33	75,35	75,37	68,45	68,47	68,48	
3	Jumlah kasus gangguan keamanan, ketertiban dan kenyamanan	0	0	0	NA	0	0	
4	Angka kemiskinan	8,52	8,45	8,03	9,85	8,96	8,52	
5	Indeks desa membangun	0,7933	0,7935	0,7937	0,7929	0,7931	0,7933	

Sumber : Kecamatan Jaten Tahun 2023

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar tahun 2024 antara lain :

1. Belum optimalnya tata laksana pemerintahan, akuntabilitas, kinerja perangkat daerah, kualitas pengelolaan keuangan, peningkatan kualitas pegawai, kompetensi ASN, kedisiplinan ASN dan peningkatan kualitas arsip digital;
2. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah;
3. Masih terjadinya konflik sosial yang mengakibatkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban umum;
4. Belum optimalnya kualitas pembangunan desa, pemberdayaan desa, lembaga kemasyarakatan desa, pembinaan dan pengawasan desa.

Dengan isu-isu penting tersebut diharapkan bisa menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

Perkembangan masyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai aspek baik sosial, ekonomi, politik, teknologi informasi dan aspek – aspek eksternal lainnya, maka harus dipahami bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Jaten ada beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan, sebagai berikut:

Tabel 2.4
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik sehingga integritas dan profesionalisme aparaturnya dalam pelayanan publik masih perlu ditingkatkan.	a. Terbatasnya jumlah aparat/pegawai di kecamatan dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal;	1. Seksi Tata Pemerintahan a. Kurangnya kualitas SDM aparaturnya desa dalam pelayanan kepada masyarakat; b. Masih rendahnya disiplin aparaturnya desa; c. Kurangnya intensitas pembinaannya terhadap pemerintahan desa; d. Belum optimalnya pengelolaan administrasi keuangan desa; e. belum optimalnya pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
2	Masih adanya konflik sosial yang mengakibatkan gangguan keamanan dan ketentraman umum karena belum optimalnya penegakan perda.	b. Belum optimalnya pemahaman aparaturnya terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing; c. Belum meratanya kompetensi dan pendidikan sumber daya aparaturnya;	2. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban a. Belum optimalnya sosialisasi Perda; b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum; c. Belum optimalnya pembinaannya Linmas desa; d. Belum optimalnya koordinasi dengan lembaga vertikal (Kepolisian RI dan TNI); e. menurunnya nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat.
3	Masih adanya warga miskin karena belum meratanya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa	d. Belum optimalnya penerapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sehingga penilaian kerja aparaturnya kurang; e. Masih lemahnya koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran; f. Masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat; g. Belum optimalnya pengelolaan aset di kecamatan; h. Belum optimalnya sistem kearsipan di kecamatan. i. Belum optimalnya penegakan perda dan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan dan	3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa a. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah desa; b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah; c. Masih kurangnya pemahaman aparaturnya desa terhadap kewenangan desa dalam pembangunan; d. Masih rendahnya kemampuan analisis Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan pembangunan.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		ketentraman. j. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat di desa sehingga masih ada ketimpangan perekonomian di desa.	<p>4. Seksi Kesejahteraan Sosial</p> <ol style="list-style-type: none"> Belum optimalnya koordinasi dalam pendataan penerima program Kesejahteraan Sosial; Kurang beragamnya kegiatan pemberdayaan perempuan; Masih tingginya tingkat pengangguran; Kurangnya pemahaman tentang kesehatan pada masyarakat desa. <p>5. Seksi Pelayanan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> Belum optimalnya pelayanan umum yang diberikan kepada masyarakat Terbatasnya sarana dan prasarana. Belum optimalnya pengelolaan aset di kecamatan;. Belum optimalnya sistem kearsipan di kecamatan.

Sumber : Kecamatan Jaten (2023)

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Sebagai salah satu perangkat daerah di Kabupaten Karanganyar, maka Kecamatan Jaten mempunyai kewajiban untuk membuat perencanaan anggaran setiap tahunnya. Salah satunya adalah membuat Rencana Kerja (Renja) Tahunan yang merupakan komponen dalam penyusunan RKPD Kabupaten Karanganyar. Pada awal penyusunan Renja, perangkat daerah menggunakan dasar penyusunan anggaran yang di tetapkan pada awal tahun. Namun ternyata pada proses penghitungan kebutuhan anggaran seringkali terjadi ketidaksesuaian antara rencana awal dengan kebutuhan riil operasional perangkat daerah. Hal ini dikarenakan adanya kebutuhan-kebutuhan yang sebelumnya tidak dapat diprediksikan serta mempertimbangkan tersedianya anggaran di Kabupaten. Berikut ini disajikan tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kecamatan Jaten. (tabel 2.5)

Tabel 2.5
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kecamatan Jaten

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6		7	8
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Jaten	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	100%	2.212.861.161	100%	2.246.225.314	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Jaten	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 bulan	57.574.800	12 bulan	57.974.800	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Jaten	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	1.835.342.011	12 bulan	1.864.030.514	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Jaten	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	87.690.000	12 bulan	87.690.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Jaten	Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	112.549.000	12 bulan	101.109.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Jaten	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	4 unit	42.000.000	2 unit	22.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Jaten	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	12 bulan	77.705.350	12 bulan	113.421.000	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Jaten	Indeks Kepuasan Masyarakat	81	36.575.200	81	36.575.200	
	Koordinasi	Kecamatan Jaten	Jumlah fasilitasi	12 bulan	36.575.200	12 bulan	36.575.200	

	Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan					
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Jaten	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	90%	15.217.800	90%	15.217.800	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Jaten	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12 bulan	15.217.800	12 bulan	15.217.800	
5	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Jaten	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	90%	147.404.030	90 %	153.524.030	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Jaten	Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	12 bulan	147.404.030	12 bulan	153.524.030	
6	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Jaten	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	100%	176.730.000	100%	163.320.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatana Jaten	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	12 bulan	176.730.000	12 bulan	163.320.000	
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Jaten	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	91 %	148.046.600	91 %	151.046.600	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Jaten	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintah desa	12 bulan	148.046.600	12 bulan	151.046.600	

Sumber : Kecamatan Jaten Tahun 2023

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Di Kecamatan Jaten usulan program atau kegiatan yang berasal dari para pemangku kepentingan dan masyarakat terangkum dalam usulan hasil musrenbangcam tahun 2023 :

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Karanganyar

KECAMATAN : JATEN

TAHUN : 2023

BIDANG FISIK PRASARANA

NO	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Lokasi (Desa/Kel)	Volume	Pagu	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	Timur Dsn Ngemplak	Kegiatan pembangunan jalan kabupaten	Pelebaran Jalan Aspal Timur Dkh Ngemplak-Jetak	Kelancaran arus lalu lintas	Jln Ocak-acik Suruhkalang	800	600.000.000	DPU Kab.
2	Desa Jaten	Memperlancar transportasi	Pelebaran jembatan Dusun Bulu	Masyarakat	Dsn Bulu, Desa Jaten	1 paket	1.000.000.000	DPU Kab.
3	Jalan Ngringo Indah dan Cempaka	Pengendalian banjir	Pembangunan Saluran Air	Pembangunan Saluran Air	Ngringo	2000 m	2 M	DPU Kab.
4	Karangasem Rt.03/03	Mempermudah Pelayanan	Pembangunan/Relokasi Kantor Balai Desa	Masyarakat	Sroyo	1 paket	5.500.000.000	DPU Kab.
5	Desa Brujul	Mencegah Genangan Air	Gorong -Gorong Jalan Kabupaten Duwet-Brujul	Tidak Adanya air yang Menngenang	Brujul		40.000.000	DPU Kab.
6	Utara Dsn. Sanggrahan	Kegiatan pembangunan jalan kabupaten	Pelebaran jembatan	Kelancaran arus lalu lintas	Suruhkalang	1 paket	300.000.000	DPU Kab.

7	Desa Jaten	Kelancaran transportasi	Pengaspalan jalan Jumok Desa Jaten-Dusun Ngamban Desa Buran	Masyarakat	Desa Jaten		300.000.000	DPU Kab.
8	Dalon sampai Kemiri	Memperlancar transportasi masyarakat	Pembangunan Jalan DPU dari Dalon sampai Acidatama	Masyarakat	Sroyo	3000	5.300.000.000	DPU Kab.
9	Desa Brujul	Memperluas bahu Jalan	Talud Jalan Kabupaten Dusun Brujul - Duwet	Kelancaran Jalan Penghubung Antar Desa	Brujul		700.000.000	DPU Kab.
10	Dusun Dagen RT 04 RW 11, dan 01 RW 09	Mengurangi banjir	Talud Jalan Provinsi depan pabrik cakra sampai saluran irigasi colo	Sanitasi Lingkungan	Dagen		500.000.000	DPU Kab.
11	Dusun Gunung Wijil	Mengendalikan Banjir	Pembangunan Pintu Air	Pengadaan Pintu Air	Ngringo	4 pintu air	500 jt	Dinas PU
12	Jetak RT 01, 02 RW 07, RT 01. 02 RW 08 dan RT 02 RW 06	Mengurangi banjir	Talud Jalan Provinsi dari depan masjid Al-Furqon Dusun Jetak sampai Gapuro Dusun Songgorunggi	Sanitasi Lingkungan	Dagen		500.000.000	DPU Kab.
13	Dusun Jati- Dukuh	Mobilitas masyarakat Lancar	Pembangunan Talud Jalan dan Pelebaran Jalan Dari Dusun Jati ke Dusun Dukuh	memperlancar transportasi	Dusun Jati-Dukuh		500.000.000	DPU Kab.
14	Dusun Grumbulsawit-Gerdu	Mengurangi kebanjiran	Saluran air Dusun Grumbulsawit-Dusun Gerdu	Sanitasi Lingkungan	Jetis		600.000.000	DPU
15	Desa Jati	Mobilitas masyarakat Lancar	Peningkatan Jalan Usaha Tani timur dukuh Pundak Rt05 RW07 Desa Jati	memperlancar transportasi	Desa Jati		200.000.000	DPU Kab.

16	Dusun Gempolrejo	Memperlancar kegiatan ekonomi	Talud Jalan kabupaten yang berlokasi di dusun Gempolrejo-Sambirejo penghubung jalan artar dusun.	Peningkatan ekonomi	Jetis		400.000.000	DPU Kab.
17	Dsn. Jetak - Ds Sapen	Kegiatan pembangunan jalan kabupaten	Talud Jalan Usaha Tani		Suruhkalang	1 paket	750.000.000	DPU Kab.
18	Desa Jaten	Memperlancar arus air saat musim penghujan	Pembangunan sqaluran drainase jalan Dusun Bulu Desa Jaten- Desa Jetis Kec. Jaten	Masyarakat	Desa Jaten		500.000.000	
19	Karangasem Rt.03/03	Mempermudah Pelayanan	Pembangunan Gedung Serbaguna	Masyarakat	Sroyo	1	500.000.000	DESA
20	Dusun Banaran dan Gunung Wijil, lokasi sampah salak dan mawar	Pengendalian Banjir	Pembangunan Talud	Pembangunan Talud Sungai	Ngringo	1600 m	1 M	Dinas PU
21	Desa Brujul	Memperluas bahu Jalan	Talud Jalan Kabupaten Dusun Duwet - Sobayan	Kelancaran Jalan Penghubug Antar Desa	Brujul		700.000.000	DPU Kab.
22	Desa Jati	Mobilitas masyarakt Lancar	Peningkatan Jalan Usaha Tani tengah Sawah Dusun Jati Ke timur	memperlancar tranportasi	Desa Jati		200.000.000	Dinas Soisal
23	Timur Dusun Jetis wetan	Memperlancar kegiatan ekonomi	Talud Jalan	Memperlancar arus transportasi	Jetis		500.000.000	DPU Kab.

24	Tuwuhan RT 03/05	Kegiatan pembangunan Lanjutan Gedung Olahraga	Pembangunan Gedung Olahraga (Lanjutan) Desa Suruhkalang		Suruhkalang	1 paket	500.000.000	DPU Kab.
----	------------------	---	---	--	-------------	---------	-------------	----------

Sumber : Seksi PMD Kecamatan Jaten Tahun 2023

KECAMATAN : JATEN

TAHUN : 2023

BIDANG EKONOMI

NO	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Lokasi (Desa/ Kel)	Volume	Pagu	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	Desa Dagen	Pengusaha Kecil	Kios Desa	Pengusaha Kecil	Dagen		200.000.000	Disperindag
2	Desa Dagen	Menciptakan lapangan pekerjaan	Ibu-ibu PKK dan Karangtaruna	Pemberdayaan dan Meningkatkan pendapatan ibu rumah tangga	Dagen		200.000.000	Disperindagkop dan UKM
3	Desa Jaten	Kebutuhan obat	Apotik hidup PKK	Warga	Jaten		100.000.000	
4	Desa Jaten	Ternak	Budidaya Perikanan dan ternak	Warga	Jaten		200.000.000	
5	Tepi lapangan Sroyo	Peningkatan Ekonomi	Pembuatan lapak kaki 5	Pedagang	Sroyo	70 buah	148.000.000	Disperindag
6	Selatan lapangan	Peningkatan Ekonomi	Kios Desa	Pedagang	Sroyo	49 buah	320.000.000	Disperindag
7	Desa Suruhkalang	Pembangunan Tempat Usaha BUMDes	Pembangunan Tempat Usaha BUMDes	BUMDes	Suruhkalang	1 paket	50.000.000	Disdagnakerkop UKM

8	Semua wilayah desa Jetis	Meningkatkan pendapatan usaha kecil	Bantuan Usaha Kecil	Bantuan Usaha Kecil	Jetis		150.000.000	Disperidagkop dan UKM
9	Desa Jati	Pengusaha Kecil	Kios Desa	Pengusaha Kecil	Jati		200.000.000	Disperindag
10	Desa Brujul	Pengusaha Kecil	Kios Desa	Pengusaha Kecil	Brujul		200.000.000	Disperindag
11	29 RW, Ngringo	Meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Ngringo	Pembangunan Pasar Desa	Pedagang	Ngringo		350 jt	Disperindag
12	6 Dusun	Peningkatan Ekonomi	Bantuan ternak kambing	Kelompok ternak	Sroyo	20 per klp	60.000.000	Disnakan
13	Desa Jetis	Meningkatkan pendapatan ibu rumah tangga	Pelatihan ketrampilan usaha produktif	Ibu-ibu PKK dan Karang taruna	Jetis		200.000.000	Disperidagkop dan UKM
14	Desa Suruhkalang	Pembangunan Selter Desa Lanjutan	Pembangunan Selter Desa Lanjutan	Pedagang	Suruhkalang	1 paket	100.000.000	Disdagnakerkop UKM
15	Desa Brujul	Menciptakan lapangan pekerjaan	Pelatihan keterampilan usaha UMKM	Pemberdayaan dan Meningkatkan pendapatan ibu rumah tangga	Brujul		200.000.000	Disperindagkop dan UKM
16	Desa Jati	Menciptakan lapangan pekerjaan	Pelatihan keterampilan usaha produkif	Pemberdayaan dan Meningkatkan pendapatan ibu rumah tangga	Jati		200.000.000	Disperindagkop dan UKM
17	29 RW, Ngringo	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Permodalan BUMDesa		Ngringo		100 jt	Dinas Disperindag

Sember : Seksi PMD Kecamatan Jaten Tahun 2023

KECAMATAN : JATEN

TAHUN : 2023

BIDANG PEMERINTAHAN UMUM

NO	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Lokasi (Desa/ kel)	Volume	Pagu	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	Desa Suruhkalang	Kegiatan pembangunan rehap kantor desa	Rehap Kantor dan Aula Desa Suruhkalang Lanjutan	Memperlancar pelayanan pada masyarakat	Suruhkalang	1 paket	1.000.000.000	DPU Kab.
2	Rehab kantor Desa Jaten	Desa Jaten	Peningkatan ekonomi	Masyarakat	Jaten		200.000.000	DPU Kab.
3	Kantor Desa Sroyo	Memperlancar Pelayanan Pada Masyarakat	Pembangunan Kantor Desa Sroyo (Pemindahan)	Memperlanjar Pelayanan Pada Masyarakat	Sroyo		1.500.000.000	DPU
4	Kantor Desa Dagen	Memperlanjar Pelayanan Pada Masyarakat	Rehab Kantor Desa Dagen	Memperlanjar Pelayanan Pada Masyarakat	Dagen		500.000.000	DPU
5	Desa Suruhkalang	Kegiatan Pembangunan Gedung Pertemuan Kampung KB dan Rumah data	Pembangunan Gedung Pertemuan Kampung KB dan Rumah data	Memperlancar pelayanan pada masyarakat	Suruhkalang	1 paket	150.000.000	DPU Kab.
6	Pembangunan gedung serba guna	Desa Jaten	Pembangunan gedung serba guna	Masyarakat	Jaten		400.000.000	DPU Kab.

7	Kantor Desa brujul	Memperlanjar Pelayanan Pada Masyarakat	Rehab Kantor Desa brujul dan Halaman Desa Brujul	Memperlanjar Pelayanan Pada Masyarakat	Brujul		500.000.000	DPU
8	Kantor Desa Ngringo	Penyelenggaraan Bidang Pemerintahan	Pemb. Gedung Aula Balai Desa	Aula Balai Desa Ngringo	Ngringo	1 Gedung	2 M	Dinas PU
9	Kantor Desa Ngringo	Penyelenggaraan Bidang Pemerintahan	Pemb. Kantor Desa	Kantor Balai Desa Ngringo	Ngringo	1 Gedung	3 M	Dinas PU
10	Lapangan Desa Jati	Lingkungan Bersih	Pembangunan MCK Lingkungan Lapangan Olah Raga Desa Jati	Masyarakat Sehat	Jati		150.000.000	DPU
11	Dukuh Gempolrejo Dusun Sambirejo	Menambah Kenyamanan dalam Pelayanan	Pemb. Gedung Kantor Desa Jetis	Pembaharuan tata Ruang Kerja	Jetis		900.000.000	DPU
12	Balai Desa Jati	Sarana Olahraga Masyarakat	Pembangunan Plafon Gedung Olah Raga dan Penerangan Desa Jati	Masyarakat Sehat	Jati		500.000.000	DPU
13	Dusun Sambirejo Dukuh Gempolrejo	Memperlancar kegiatan Masyarakat	Pemb. Gedung Serba Guna Desa Jetis	Peningkatan Kegiatan Warga Desa Jetis	Jetis		800.000.000	DPU
14	Se Desa Jetis	Memperlancar kegiatan Masyarakat	Perbaikan Jalan	Memperlancar arus transportasi	Jetis		500.000.000	DPU

Sember : Seksi PMD Kecamatan Jaten Tahun 2023

KECAMATAN : JATEN

TAHUN : 2023

BIDANG SOSIAL BUDAYA

NO	sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioroitas	Sasaran Kegiatan	lokasi(Desa/ kel)	Volume	Pagu	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	Desa Suruhkalang	Kelancaran angkutan orang sakit	Pengadaan Ambulance Desa	Desa Suruhkalang	Suruhkalang	1 Unit	300.000.000	Dinkes
2	Desa Jati	Meningkatkan Kualitas anak didik	Peningkatan kapasitas TK dan PAUD	Anak-anak TK dan PAUD	Jati		200.000.000	Dikbud
3	Desa Jaten	Kesenian	Pengadaan gamelan	Paguyupan Karawitan	Jaten	1 set	200.000.000	Dikbud
4	Desa Dagen	Meningkatkan Kualitas anak didik	Peningkatan kapasitas TK dan PAUD	Anak-anak TK dan PAUD	Dagen		200.000.000	Dikbud
5	Desa Ngringo	Kesehatan	Kegiatan Posbindu	Posbindu,	Ngringo		50 jt	Dinkes
6	Desa Jetis	Meningkatkan Pendidikan anak TK dan PAUD	Peningkatan Pendidikan anak TK dan PAUD	Anak-anak TK dan PAUD	TK PERTIWI 02		200.000.000	Dikbud
7	Desa Sroyo	Penanganan Limbah peternakan	Kebersihan Lingkungan	Peternak	Pulosari, Sroyo	100 KK	150.000.000	Disnakan
8	Desa brujul	Meningkatkan Kualitas anak didik	Peningkatan Fasilitas Pendidikan TK dan	Anak-anak TK dan PAUD	Brujul	1 paket	200.000.000	Dikbud

			PAUD					
9	Kecamatan Jaten	Pengadaan dan peningkatan sekolah SMAN	Ijin Pendirian SMA	anak Lulusan SMP	Kecamatan Jaten	1 Unit	5.000.000.000	DikBud Prov
10	Desa Suruhkalang	Karawitan	Pengadaan Seperangkat Gamelan	Masyarakat Desa Suruhkalang	Suruhkalang	1 paket	200.000.000	Dikbud
11	Desa Jati	Karawitan	Pengadaan Alat Gamelan	Seniman desa Jati	Jati	1 paket	200.000.000	Dikbud
12	Desa Jaten	Seni budaya	Pengadaan alat rebana	Masyarakat Desa Jaten	Jaten	1 paket	100.000.000	Dikbud / Kesra Setda
13	Desa Dagen	Peningkatan Keimanan	Pengadaan Alat Rebana	Jamaah Masjid	Dagen	2 paket	250.000.000	Dikbud
14	Desa Ngringo	Kesehatan	Kegiatan Penyuluhan Kesehatan	Penyuluhan Kesehatan	Ngringo		50 jt	Dinas Kesehatan
15	Desa Jetis	Meningkatkan keimanan	Pengadaan Alat Rebana	Jamaah masjid	Desa Jetis SYAAKHIR AL-MUQRI		200.000.000	Dikbud / Kesra Setda
16	Desa Sroyo	Penyaluran bakat	Pengadaan Alat Rebana	Masyarakat desa Sroyo	Dalon	1 paket	100.000.000	Dikbud / Kesra Setda
17	Desa Brujul	Melestarikan Kebudayaan	Pengadaan Alat Pertunjukan Wayang	Kelompok Keseian	Brujul	1 paket	250.000.000	Dikbud / Kesra Setda

Sumber : Seksi PMD Kecamatan Jaten Tahun 2023

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Tahun 2024 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026, sehingga untuk penyusunan RKPD Tahun 2024 harus mengacu pada RPD Tahun 2024–2026.

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan dan isu strategis, dengan mengacu dan menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025, maka tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Tahun 2024-2026 adalah “Meningkatkan Daya Saing Daerah”

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan ditetapkan sasaran-sasaran pokok pembangunan, antara lain :

1. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan
3. Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal
4. Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi
5. Meningkatkan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024

Tahun 2024 merupakan tahun yang strategis karena Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 akan selesai, sehingga banyak sasaran nasional yang perlu disinergikan dengan Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 mempunyai Tema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 melanjutkan 7 prioritas pembangunan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 memuat 8 (delapan) arah kebijakan yaitu :

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
4. Penguatan daya saing
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas
7. Percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)
8. Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 menetapkan sasaran pembangunan yang mencakup :

1. Pertumbuhan Ekonomi, dengan target 5,3-5,7%
2. Tingkat Kemiskinan, dengan target 6,5-7,5%
3. Tingkat Pengangguran Terbuka, dengan target 5,0-5,7%
4. Nilai Tukar Nelayan, dengan target 107-110 poin
5. Rasio Gini, dengan target 0,374-0,377 poin
6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan target 73,99-74,02 poin
7. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, dengan target 27,27%
8. Nilai Tukar Petani, dengan target 105-108 poin

Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Nasional diproyeksikan berkisar 5,3-5,7%, dengan proyeksi pertumbuhan di kawasan barat Indonesiaberkisar 5,0-5,4% dan kawasan timur 6,5-7,3%.

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2024

Arah kebijakan tahun pertama (2024) adalah Peningkatan demokrasi dan kesejahteraan didukung pelaksanaan reformasi birokrasi (satu pintu, e government) serta penguatan SDM dan daya saing daerah. Prioritas pada tahun 2024 adalah :

1. **Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih melayani dan inovatif serta peningkatan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi**, difokuskan pada :

- a. Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel dan melayani melalui peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan, kualitas ASN, implementasi Satu Data dan *Electronic Government (E-Gov)* dan keamanan informasi daerah;
- b. Peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan dan Optimalisasi pengelolaan aset daerah;
- c. Peningkatan pengelolaan arsip digital;
- d. Peningkatan kualitas sektor pelayanan publik dan kewilayahan;
- e. Peningkatan kualitas pengendalian dan pengawasan pembangunan untuk mengurangi kesalahan administrasi dan penyalahgunaan anggaran pembangunan;
- f. Peningkatan toleransi, kerukunan antar umat beragama, wawasan kebangsaan dan bela Negara serta peningkatan partisipasi politik;
- g. Peningkatan implementasi inovasi daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah.

2. **Pemantapan kondusivitas wilayah dan penguatan ketahanan bencana**, difokuskan pada :

- a. Peningkatan keamanan lingkungan dengan mengutamakan pencegahan ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Optimalisasi partisipasi politik di kalangan masyarakat terutama untuk pemilih pemula;
- c. Pengurangan resiko bencana melalui upaya mitigasi dan peningkatan kapasitas relawan bencana, penguatan manajemen krisis terpadu serta sistem logistik, untuk operasi tanggap darurat dan penanganan pasca bencana.

3. **Perwujudan kualitas hidup SDM yang berdaya saing**, difokuskan pada :

- a. Peningkatan kualitas layanan dan fasilitas kesehatan dalam rangka mewujudkan standar pelayanan minimal kesehatan, penurunan stunting, mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);

- b. Pengendalian penduduk melalui peningkatkan pemahaman masyarakat untuk mewujudkan generasi yang berkualitas, peningkatan kesadaran masyarakat ber KB dan keluarga sejahtera;
 - c. Peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan dalam rangka perwujudan standar pelayanan minimal bidang pendidikan, dan mengurangi jumlah anak usia sekolah tidak sekolah serta perwujudan sekolah inklusi;
 - d. Pengembangan budaya literasi masyarakat;
 - e. Pemberdayaan wirausaha muda dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - f. Peningkatan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dan olahraga rekreasi;
 - g. Peningkatan kualitas SDM dalam pelestarian budaya dan cagar budaya;
 - h. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dan pemenuhan hak anak.
4. **Percepatan pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem** difokuskan pada :
- a. Peningkatan kualitas produksi pertanian dititikberatkan pada kualitas sarana dan prasarana pertanian, pengembangan agro industri;
 - b. Peningkatan produksi perikanan budidaya dan tangkap;
 - c. Peningkatan pertumbuhan usaha mikro dengan penguatan kelembagaan, akses permodalan melalui peran koperasi, pengembangan produk-produk unggulan daerah bersertifikat, peningkatan sarpras pemasaran/perdagangan dan penguatan branding;
 - d. Pengembangan industri kecil menengah dengan penguatan sentra/kluster industri, pengembangan ekonomi kreatif dan perluasan pasar berbasis digital;
 - e. Peningkatan pelayanan perijinan dan investasi dengan optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) dan peningkatan kualitas Laporan kegiatan Penanaman modal;
 - f. Optimalisasi penanganan kemiskinan melalui jaring pengaman sosial, pemberdayaan ekonomi, kerjasama intervensi lintas sektor dan swasta dengan memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
 - g. Optimalisasi potensi cadangan pangan masyarakat melalui peningkatan pemanfaatan lahan dan diversifikasi produk pangan;
 - h. Peningkatan keterampilan berusaha dan perluasan lapangan kerja;
 - i. Peningkatan daya saing pariwisata lokal dengan penguatan kualitas sarpras daya tarik wisata dan desa wisata.

5. Peningkatan Kualitas Infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan

ekonomi, difokuskan pada :

- a. Peningkatan kualitas infrastruktur untuk mendukung konektivitas antar wilayah yang menghubungkan pusat produksi dan distribusi melalui peningkatan kemantapan jalan dan jembatan;
- b. Percepatan pencapaian SPM bidang perumahan permukiman melalui pemenuhan penanganan rumah tidak layak huni bagi korban bencana dan korban program pembangunan, penguatan kualitas PSU permukiman dan pencegahan kawasan kumuh;
- c. Peningkatan akses air minum pada masyarakat dan peningkatan akses sanitasi layak;
- d. Pengelolaan Sumber daya air untuk mendukung penanganan banjir dan peningkatan kualitas sistem irigasi.

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah merupakan upaya untuk mencapai target indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 yaitu:

1. Angka Kemiskinan sebesar 8,52%;
2. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 77,20;
3. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,00;
4. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 65; dan
5. Indeks Resiko Bencana sebesar 82.

3.2. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Jaten

Tujuan dan sasaran Kecamatan Jaten dalam masa transisi tahun 2024 -2026 mengacu pada tujuan dan sasaran RPD (Rancangan Pembangunan Daerah) Kabupaten Karanganyar periode tahun 2024 – 2026. Tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 mengacu pada Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahap Keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025. Perumusan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 juga berdasarkan pada analisis isu-isu strategis dan aktual yang tengah berlangsung, serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026. Dokumen RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 berada pada periode tahapan Keempat dari RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025, sehingga prioritas pembangunan jangka panjang tahap keempat (2020-2025)

akan menjadi acuan dalam perumusan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 ini yang menjadi dasar dalam penentuan tujuan dan sasaran Renstra OPD periode transisi yaitu tahun 2024 – 2026.

3.2.1 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Tujuan Kecamatan Jaten dalam masa transisi kepemimpinan kepala daerah di Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. **Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi.** Adapun indikator dari tujuan ini adalah indeks reformasi birokrasi yang merupakan hasil penilaian penerapan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
2. **Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial.** Tolak ukur dari indikator ini adalah angka kemiskinan di Kabupaten Karanganyar.

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional. Sasaran Kecamatan Jaten dalam pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam masa transisi ini adalah sebagai berikut :

1. **Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan.**

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja sasaran ini adalah nilai Sakip OPD yang merupakan hasil penilaian dari inspektorat daerah.

2. **Meningkatkan kondusifitas wilayah.**

Dalam mencapai kinerja sasaran tersebut diukur dengan indikator yaitu jumlah kasus gangguan keamanan, ketertiban dan kenyamanan yang diperoleh dari data laporan terkait gangguan keamanan, ketertiban dan kenyamanan.

3. **Meningkatkan kualitas pembangunan desa.**

Sasaran Kecamatan Jaten ini diukur dengan indikator indeks desa membangun yang diperoleh dari hasil E-IDM Kementerian Desa tingkat

kecamatan.

Pernyataan tujuan dan sasaran Kecamatan Jaten dalam masa transisi beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.2 sebagaimana berikut :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Jaten
Tahun 2024-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran	Kondisi Akhir Renstra
					Realisasi 2022	Target 2023	2024	
1	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	63	64	65	70
		Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	Nilai	Na	70	75,33	75,37
		Meningkatkan kondusifitas wilayah	Jumlah kasus gangguan keamanan, ketertiban dan kenyamanan	Kasus	Na	Na	0	0
2	Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial		Angka kemiskinan	%	9,85	8,96	8,52	8,03
		Meningkatkan kualitas pembangunan desa	Indeks desa membangun	Indeks	0,7929	0,7931	0,7933	0,7937

Sumber : Baperlitbang Kab. Kra (2023)

3.3 Program dan Kegiatan Kecamatan Jaten

Program dan Kegiatan yang direncanakan pada tahun 2024 merupakan penjabaran dari dokumen renstra 2024-2026, Kecamatan Jaten telah merencanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, yang meliputi :

1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah
 - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Rumusan program/ kegiatan tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini. (tabel 3.3)

Tabel. 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Jaten Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kode				Urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Unsur Wilayah								
				Kecamatan				2.765.508.944				3.078.800.000
01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya		100%	2.246.225.314	APBD Kab.Kra		100%	2.520.800.000
01	2	01	01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kec Jaten	12 bulan	54.723.700	APBD Kab.Kra		12 bulan	47.000.000
01	2	01	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kec Jaten	12 bulan	1.864.030.514	APBD Kab.Kra		12 bulan	2.100.000.000
01	2	01	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Kec Jaten	12 bulan	101.109.000	APBD Kab.Kra		12 bulan	127.600.000
01	2	01	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	Kec Jaten	2 unit	22.000.000	APBD Kab.Kra		12 bulan	40.000.000
01	2	01	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	Kec Jaten	12 bulan	87.690.000	APBD Kab.Kra		12 bulan	76.200.000

					daerah							
01	2	01	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	Kec Jaten	12 bln	113.421.000	APBD Kab.Kra		12 bulan	130.000.000
02				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat		81	36.575.200	APBD Kab.Kra		81,1	40.000.000
02	2	01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	Kec Jaten	12 bulan	36.575.200	APBD Kab.Kra		12 bulan	40.000.000
03				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif		90%	15.217.800	APBD Kab.Kra		92%	40.000.000
03	2	01		Koodinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kec Jaten	12 bulan	15.217.800	APBD Kab.Kra		12 bulan	40.000.000
04				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif		90%	153.524.030	APBD Kab.Kra		92%	190.000.000
04	2	03		Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kec Jaten	12 bulan	153.524.030	APBD Kab.Kra		12 bulan	190.000.000
05				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan		100%	163.320.000	APBD Kab.Kra		100%	127.000.000
05	2	01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan	Kec Jaten	12 bulan	163.320.000	APBD Kab.Kra		12 bulan	127.000.000

				Penugasan Kepala Daerah	umum							
06				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan		91%	151.046.600	APBD Kab.Kra		100%	161.000.000
06	2	01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintah desa	Kec Jaten	12 bulan	151.046.600	APBD Kab.Kra		12 bulan	161.000.000

3.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Jaten

3.4.1 Tantangan

- 1) Adanya tuntutan pengembangan teknologi.
- 2) Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- 3) Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja yang dihasilkan.
- 4) Cepatnya arus informasi masyarakat dalam menyampaikan, saran keluhan dan masukan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

3.4.2 Peluang

- 1) Adanya tuntutan implementasi *Good Governance* dan *Clean Government* merupakan peluang pada Kantor Kecamatan Jaten untuk meningkatkan kinerja.
- 2) Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN JATEN

Pada tahun 2024, Kecamatan Jaten telah merencanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, yang meliputi :

1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah
 - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Rumusan program dan kegiatan tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini. (tabel 4.1)

Tabel. 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Jaten
Tahun 2024

Kode				Urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Unsur Kewilayah								
				Kecamatan				2.765.508.944				3.078.800.000
01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya		100%	2.246.225.314	APBD Kab.Kra		100%	2.520.800.000
01	2	01	01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kec Jaten	12 bulan	54.723.700	APBD Kab.Kra		12 bulan	47.000.000
01	2	01	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kec Jaten	12 bulan	1.864.030.514	APBD Kab.Kra		12 bulan	2.100.000.000
01	2	01	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Kec Jaten	12 bulan	101.109.000	APBD Kab.Kra		12 bulan	127.600.000
01	2	01	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	Kec Jaten	2 unit	22.000.000	APBD Kab.Kra		12 bulan	40.000.000
01	2	01	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang	Kec Jaten	12 bulan	87.690.000	APBD Kab.Kra		12 bulan	76.200.000

					urusan pemerintahan daerah							
01	2	01	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	Kec Jaten	12 bln	113.421.000	APBD Kab.Kra		12 bulan	130.000.000
02				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat		81	36.575.200	APBD Kab.Kra		81,1	40.000.000
02	2	01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	Kec Jaten	12 bulan	36.575.200	APBD Kab.Kra		12 bulan	40.000.000
03				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif		90%	15.217.800	APBD Kab.Kra		92%	40.000.000
03	2	01		Koodinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kec Jaten	12 bulan	15.217.800	APBD Kab.Kra		12 bulan	40.000.000
04				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif		90%	153.524.030	APBD Kab.Kra		92%	190.000.000
04	2	03		Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kec Jaten	12 bulan	153.524.030	APBD Kab.Kra		12 bulan	190.000.000
05				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan		100%	163.320.000	APBD Kab.Kra		100%	127.000.000
05	2	01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan	Kec Jaten	12 bulan	163.320.000	APBD Kab.Kra		12 bulan	127.000.000

				Penugasan Kepala Daerah	urusan pemerintahan umum							
06				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan		91%	151.046.600	APBD Kab.Kra		100%	161.000.000
06	2	01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintah desa	Kec Jaten	12 bulan	151.046.600	APBD Kab.Kra		12 bulan	161.000.000

BAB V

PENUTUP

Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan yang diemban oleh Kecamatan Jaten sebagai salah satu OPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jaten merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024 dilingkup Kecamatan Jaten, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah Tahun 2024 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Kecamatan Jaten.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen Renja ini. Semoga Renja Kecamatan Jaten Tahun 2024 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO



